



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## KPK Diminta Awasi Proyek Monas

**JAKARTA (Pos Kota)**  
 – DPRD DKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan memeriksa proyek revitalisasi Monas. Menyusul banyaknya temuan yang membuat janggal pelaksanaan perbaikan taman kebanggaan warga ibukota itu.

— Peliput: John —

”  
**DPRD DKI Temukan Banyaknya Kejanggalan**  
 ”

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono, pihaknya menenggarai banyaknya temuan kejanggalan. Agar pemeriksaan lancar, proyek harus dihentikan agar tidak banyak menanggung kerugian. "Ini harus dihentikan sampai persoalannya tuntas. KPK harus turun tangan mengawasi," kata Gembong Warsono, Kamis (23/1).

Mulai dari proses lelang, pemenang tendernya serta penebangan pohon, termasuk masalah perizinannya. "Proyek revitalisasi Monas sudah nggak bener, makanya kalau diteruskan hasilnya jadi nggak bener. Mending distop dulu pengerjaannya," kata Gembong.

Gembong menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Keputusan Presiden (Keppres) No. 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Ka-



wasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa setiap perubahan harus atas seizin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemenseneg).

Bukan cuma itu, Gembong juga mempersoalkan penebangan pohon di sekitar 190 pohon di area Monas sebagai bagian proses revitalisasi Monas.

Diketahui, pada awal 2019, Pemprov DKI mengalokasikan Rp147 miliar untuk program ini. Di akhir tahun, anggaran tersebut berubah menjadi Rp71 miliar karena dianggap tidak sanggup diselesaikan. Konstruksinya dimulai 12 November 2019 dan

sepanjang 50 hari dan sudah ada perpanjangan kontrak hingga pengerjaan tahun 2020.

### SEMPAT RAGU

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Perencanaan dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menyatakan kejanggalan dengan pemenang proyek revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara (BPN). "Saya tadinya mohon maaf sempat maragukan. Tapi kami lihat hasil kerjanya oh bisa kok," kata Heru Hermawanto.

Menurut Heru, yang terpenting pemenang telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi peserta lelang.

Syarat tersebut tertuang dalam Undang-undang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Menurut Heru, hasil pekerjaan dari proyek yang pernah dilakukan PT Bahana Prima Nusantara (BPN) terbilang bagus. "Saya akui memang kalau soal pekerjaan bagus memang. Artinya mampu," ujarnya.

"Kalau kantor antara domisili dengan kantor (perwakilan berbeda). Masalahnya kalau ada kantor perwakilan. Kalau ada kantor perwakilan kan bisa mana saja."

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BP-PBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda men-

gungkapkan alasan mereka memenangkan PT Bahana Prima Nusantara sebagai kontraktor proyek revitalisasi Monas.

Menurutnya, BPN menawarkan harga yang wajar dan memenuhi persyaratan perizinan. PT BPN, kata Blessmiyanda, menawarkan harga Rp 64 miliar dari harga perkiraan satuan (HPS) Rp 71 miliar.

"Di samping itu penyedia harus memiliki kemampuan dasar untuk pengalaman sejenis dalam bangunan gedung dan likuiditas keuangan yang harus ngeracanya diaudit. PT Bahana ini memenuhi semua," pungkas Blessmiyanda. (ruh)